

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2005-2014**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**SUCI LESTARI**

**10700112005**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Lestari  
NIM : 10700112005  
Tempat/Tgl. Lahir : Jampu, 11 September 1993  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jln. Teratai Indah Macanda  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan  
Asli Daerah Di Kabupaten Soppeng.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain sebagian atau seuruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 7 Juni 2016

Penyusun,

  
Suci Lestari

NIM: 10700112005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014*", yang disusun oleh *Suci Lestari*, NIM: *10700112005*, mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 M. bertepatan dengan 4 Ramadhan 1437 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ilmu Ekonomi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 Juni 2016 M  
04 Ramadhan 1437 H

### DEWAN PENGUJI:

|               |                                    |         |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag | (.....) |
| Sekretaris    | : Dr. Syaharuddin, M.Si            | (.....) |
| Munaqasyah I  | : Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si   | (.....) |
| Munaqasyah II | : Mustafa Umar, S.Ag., M.Si        | (.....) |
| Pembimbing I  | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag     | (.....) |
| Pembimbing II | : Bahrul Ulum, S.E., M.Sc          | (.....) |

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag  
NIP: 1958102219870951002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO:**

- ❖ Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan  
(Herodotus)
- ❖ Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakannya/diperbuatnya  
(Ali bin Abi Thalib)
- ❖ Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri  
(Ibu Kartini)
- ❖ Kehidupan seperti gema. Apapun yang kita lakukan baik maupun buruk di dunia ini maka akan kembali pada kita. Seperti suara kita yang menggema akan kita dengar kembali ketika kita berteriak  
(Suci Lestari)

### **PERSEMBAHAN:**

Karya ini kupersembahkan:

- ❖ Untuk ayahku dan almarhumah ibuku sebagai jubah hidupku
  - ❖ Untuk keluarga besarku
- ❖ Untuk Almamaterku. Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw, Nabi yang tidak pernah jenuh menyampaikan ajaran agama tauhid dan telah menjadi suri tauladan bagi ummatnya.

Atas izin dan kehendak Allah SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014” telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini adalah atas izin Allah SWT sebagai pemegang kendali dan penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Tidak lepas pula doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis yang selaku percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang indah.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda H. Sukardi S sebagai motivator yang tiada hentinya menyertai penulis dengan ketulusan doa dan restu serta dukungan moril untuk selalu optimis dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Dan untuk almarhumah ibunda Nur Hayati terima kasih telah melahirkan saya di dunia ini menjadi seorang perempuan yang tetap tegar menjalani kerasnya alur kehidupan. Kupersembahkan kado sederhana ini untuk mengukir senyuman bangga dibibir kalian sebagai balasan atas kerja keras selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan.
4. Bapak Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si dan Hasbiullah, S.E.,M.Si, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku pembimbing I dan Bahrul Ulum, S.E.,M.Sc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Untuk penguji komprehensif Dr. Syaharuddin, M.Si, Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si dan Hasbiullah, S.E., M.Si yang telah mengajarkan kepada saya bahwa seseorang yang ingin lulus dari kampus dengan baik harus mengejar ilmu yang banyak bukan mengejar nilai yang tinggi.
7. Untuk penguji munaqasyah saya Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si dan Mustafa Umar S.Ag., M.Si yang telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang teliti dan memotivasi saya untuk menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Seluruh pegawai Staf Akademik, Staf Perpustakaan, Staf Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
10. Pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk kakak saya Jurhani, Lamise, S.Sos dan Herman, terima kasih selama ini memberikan banyak kasih sayang, doa serta support dari saya kecil sampai sekarang yang telah menjadikan saya seorang adik kecil yang mandiri, tidak cengeng dan bisa membanggakan orang tua.
12. Untuk kakak ipar saya Tamrin, Neny Rozana dan Risma, terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan support yang tidak ternilai selama ini.

13. Untuk adik saya satu-satunya Sri Mulyani (Park Sri Hye bedede nama koreanya hahahahaha☺) yang cerewet dan loudspeaker (seperti bom meledak kalo bicara), terima kasih selalu menjadi badut disaat saya sedih, menjadi orang yang menyadarkan saya bahwa dunia ini hampa tanpa kehadiran seorang adik sepertimu.
14. Untuk keponakan-keponakan saya yang kecil Annisa, Affan, Alfath, Ripa, Ola, Langit dan Cila terima kasih telah menjadi badut-badut kecil yang selalu membuat saya tertawa namun kadang membuat saya jengkel dengan kenakalan kalian, tapi itulah seni kalian yang membuat hidup saya penuh warna.
15. Untuk sahabat terbaik saya dari YESS OWCH Lia (Nuratul Awalia S.E yang telah sarjana duluan. Hehehe), Cia (si Bulat), Rahma (si Cuek), Kak Azis (Sigan alias Si Ganteng bedede), Kak Rendy (kakak Manis bedede), Kak Ito (si Perut Buncit), Kak Mimmang (kakak paling kocak), Kak Jasmir, Kak Ihwan (si Pendiam), Kak Kamal, Kak Jahar, Kak Mayud, Kak Abdul, Kak Ilfandi, dan Kak Awal terima kasih telah menjadi saudara saya di bangku kuliah ini yang menyadarkan saya bahwa persahabatan kita seperti Indonesia yang berasal dari berbagai suku namun tetap satu jua. Saya bersyukur dan bahagia punya sahabat seperti kalian yang selalu ada dalam suka maupun dukaku.
16. Untuk sahabat terbaikku yang jauh di mata Nur Jaya di STAI DDI AD Mangkoso dan Andi Bisyriani di STAIN Pare-Pare terima kasih menjadi



tempat curhatanku yang selalu memberi support dan menjadi teman suka maupun dukaku.

17. Untuk teman-teman seangkatan Ilmu Ekonomi 2012, angkatan keramat (kata senior waktu OPAK), angkatan tersolid dan terhebat semoga semuanya tidak terlupakan dan menjadi kenangan yang indah untuk dikenang nanti.
18. Untuk keluarga besar Ilmu Ekonomi senior-senior 2011 Kak Lala, Kak Sely, Kak Tina, Kak Bulan, Kak Rohandi, Kak Mardan, Kak Chua, Kak Zul, Kak Alif, Kak Mufli, Kak Wahyu, Kak Ahmad terima kasih untuk masukan-masukan perbincangan singkat tentang perjuangan untuk menjadi sarjana dan untuk junior-junior 2013 terima kasih atas dukungannya semoga kalian cepat nyusul dan jangan takut dengan skripsi karena skripsi pasti berlalu.
19. Untuk teman seperjuangan Ulfa, Nindy, Rahma, Cia, Lia, Marda, Asrul, Azis, Ito, Rendy, Jasmir, Kamal, Jahar, Wiwi, Halil, Eka, Ajeng, Harryadi, Riska, Ina dan Murni yang setia menunggu di depan jurusan dan merasakan susahnyanya perjuangan untuk meraih gelar SE.
20. Seluruh teman-teman KKN Profesi Angkatan VI Kec. Binamu Kabupaten Jennepono khususnya teman poskoku, posko II Niar, Ana, Rahma dan Meydi. Selama dua bulan yang merupakan waktu berharga untuk kita saling mengenal dan berbagi pengalaman. Terima kasih kalian menjadi teman yang luar biasa dan takkan terlupakan.
21. Untuk teman-teman SDN, I'Dadiyyah dan MTs. DDI Mangkoso, MTs. Dan MA DDI Pattojo terima kasih telah menjadi teman dan menjadi bagian dari

hidupku. Semoga kita adalah teman yang tidak saling melupakan dan menjadi orang sukses.

22. Untuk teman kosku Lia dan Cia terima kasih telah mewarnai perjalanan hidupku selama ini, menjadi orang pertama yang memberikan perhatian dikala saya sedih, menjadi orang yang ambisius mengkritik saya dalam berbagai hal yang pada intinya untuk kebaikan saya sendiri

23. Untuk Ibu Kos saya beserta keluarga terima kasih telah menganggap saya seperti anak sendiri menjadikan saya seperti ada di rumah sendiri

24. Untuk Kaptenku yang juga tengah berjuang menuju kesuksesan, terima kasih selalu ada di belakangku dengan setia memberikan motivasi sehingga penulis tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis secara terkhusus. Penulis juga menyadari bahwa skripsi jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati penulis berharap semoga kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Gowa 7 Juni 2016

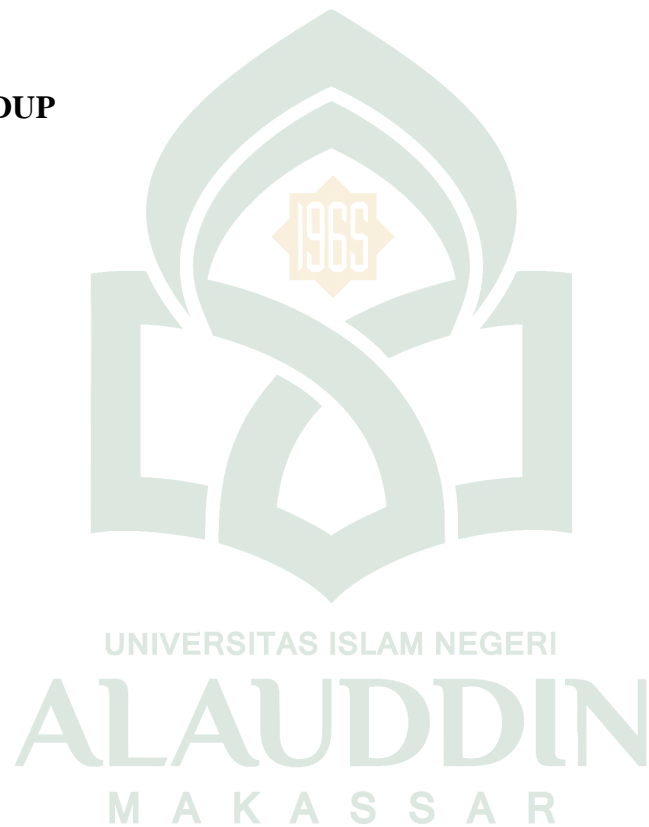
Penulis

**Suci Lestari**  
**NIM: 10700112005**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Halaman Sampul .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>Motto dan Persembahan.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>Kata Pengantar .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>Daftar Tabel .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>Daftar Gambar .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>Abstrak .....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 12          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 12          |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 13          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>   | <b>14</b>   |
| A. Otonomi Daerah .....   | 14          |
| B. Pembangunan Ekonomi Daerah .....   | 18          |
| C. Pendapatan Asli Daerah .....   | 23          |
| D. Daya Pajak ( <i>Tax Effort</i> ) .....   | 32          |
| E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....  | 34          |
| F. Jumlah Penduduk .....  | 37          |
| G. Hubungan Antar Variabel .....  | 41          |
| H. Penelitian Terdahulu .....   | 43          |
| I. Kerangka Pikir .....   | 47          |
| J. Hipotesis .....  | 48          |
| K. Defenisi Operasional .....   | 49          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>51</b>   |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....  | 51          |
| B. Jenis dan Sumber Data .....  | 51          |
| C. Metode Pengumpulan Data .....  | 52          |
| D. Metode Analisis Data .....   | 52          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>61</b>   |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng .....  | 61          |
| B. Perkembangan Daya Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng ..... | 65          |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| C. Hasil Pengolahan Data ..... | 75        |
| D. Pembahasan .....            | 82        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>     | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....            | 89        |
| B. Saran .....                 | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>           |           |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng .....  | 5  |
| Tabel 1.2 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan<br>2010 di Kabupaten Soppeng ..... | 10 |
| Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Soppeng .....   | 11 |
| Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....  | 44 |
| Tabel 4.1 Pemabagian Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng .....  | 60 |
| Tabel 4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng ....                                     | 64 |
| Tabel 4.3 Perkembangan Daya Pajak Total .....   | 66 |
| Tabel 4.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto .....   | 69 |
| Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif .....   | 71 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....   | 73 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....  | 74 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....   | 75 |
| Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Uji Regresi .....  | 75 |
| Tabel 4.10 Koefisien Determinasi .....  | 77 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan) .....   | 78 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji t (Parsial) .....  | 79 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Perkembangan Daya Pajak di Kabupaten Soppeng ..... | 8  |
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....                               | 47 |
| Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas .....                      | 73 |
| Gambar 4.3 Uji Autokorelasi .....                             | 74 |
| Gambar 4.2 Perkembangan Daya Pajak.....                       | 80 |



## ABSTRAK

**Nama : Suci Lestari**

**Nim : 10700112005**

**Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Soppeng Periode  
2005-2014**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk usia produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan data diolah dengan kebutuhan model yang digunakan. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linear berganda dengan metode Kuadrat Terkecil Biasa atau *Ordinary Least Square (OLS)* melalui program *views 6*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk usia produktif berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan secara parsial, hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 3,541 yang berarti bahwa apabila PDRB naik 1% maka PAD akan naik 3,541% . Sedangkan variabel lainnya yaitu daya pajak dan jumlah penduduk usia produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Dari hasil regresi, nilai *R-Squared* ( $R^2$ ) sebesar 0,929. Ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi PAD di Kabupaten Soppeng sebesar 92,9% sedangkan sisanya 7,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

**Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daya Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Ordinary Least Square**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sejak 1 Januari 2001, Otonomi Daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia dengan tujuan menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan alat dan sarana untuk membangun demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Adapun tujuan utama adanya desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:<sup>1</sup>

1. Untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat yang lebih baik.
2. Demi menjamin demokrasi dalam hal memaksimalkan partisipasi publik dalam setiap jenjang pengambil keputusan dan kebijakan publik dan memungkinkan kontrol serta pertanggungjawaban yang lebih baik.
3. Mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan rakyat setempat.
4. Untuk membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.
5. Pemangkasan rentang birokrasi dan mengurangi peluang korupsi.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Ed.II,2007), h. 205.



Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-undang mengenai Otonomi Daerah yaitu, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional.

Dalam BAB III UU No.32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 16 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kabupaten/kota. Namun ada urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.<sup>2</sup>

Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah yang optimal, maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasar pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 terdiri dari tiga

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, h. 13.

macam, yaitu Pajak Daerah (*Tax Assignment*), Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, maka wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi semakin luas. Termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya, sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Konsekuensi dari otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota adalah harus mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam membiayai program-program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan potensi yang dimiliki.<sup>3</sup>

Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah,

---

<sup>3</sup> Lilik Yunanto. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*, (Skripsi:2010).

hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap suatu penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD, maka semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar pula kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah sebagai salah satu komponen PAD. Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdikasinya tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dibayarkannya.<sup>4</sup>

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah dan masyarakat yang ada di daerah dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara

---

<sup>4</sup> Dina Anggraeni. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Skripsi, 2010).

bertanggung jawab tanpa ada dominasi dari pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang sah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Peranan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Namun, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional. Yaitu, pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali sumber pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Berikut akan disajikan perubahan PAD Kabupaten Soppeng selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2005-2014.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng 2005-2014**

| <b>Tahun</b> | <b>PAD (rupiah)</b> |
|--------------|---------------------|
| 2005         | 7.085.151.214,00    |
| 2006         | 11.266.106.312,36   |
| 2007         | 15.821.801.661,30   |
| 2008         | 17.460.780.984,00   |
| 2009         | 16.089.970.808,00   |
| 2010         | 20.393.023.061,00   |
| 2011         | 21.551.766.287,00   |
| 2012         | 25.694.588.261,47   |
| 2013         | 40.096.283.908,00   |
| 2014         | 60.389.274.523,00   |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 (diolah).*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Soppeng secara umum dari tahun ke tahun khususnya sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2005 sampai pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di tahun 2009 terjadi penurunan pendapatan dan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun selanjutnya. PAD di tahun 2014 menunjukkan angka tertinggi yaitu sebanyak Rp 60.389.274.523 dibanding tahun-tahun sebelumnya dan PAD yang paling rendah terjadi pada tahun 2005 yaitu hanya Rp 7.085.151,214. Dengan melihat perkembangan PAD yang cukup signifikan maka hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dipengaruhi oleh daya pajak (*tax effort*), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk.

Banyak potensi daerah dapat digali dari Kabupaten Soppeng yang bisa menghasilkan pemasukan cukup pada Pendapatan Asli Daerah. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Soppeng berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mencari penerimaan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajak daerah. Daya pajak merupakan pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajaknya (*tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari pajak (*tax base*) dikalikan tarifnya.<sup>5</sup>

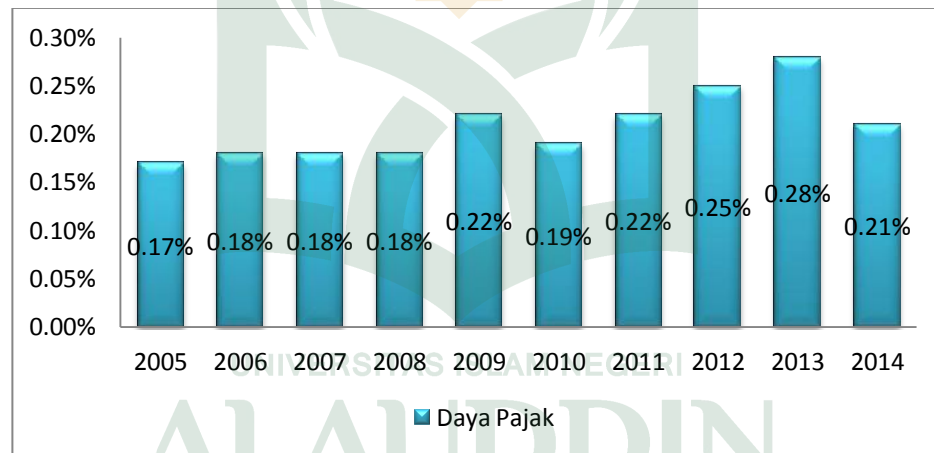
Daya pajak (*tax effort*) menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan PDRB. Dana transfer pemerintah pusat dapat mempengaruhi daya pajak daerah melalui efek substitusi dan efek stimulasi. Efek substitusi ditemukan jika dana transfer pemerintah pusat mengurangi daya pajak daerah, dengan kata lain terjadi penurunan dalam pengumpulan pajak. Hal ini disebabkan karena daerah mengadakan dana transfer pemerintah. Sedangkan efek stimulasi terjadi jika dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan daya pajak daerah.

---

<sup>5</sup> Suparmoko. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, Ed.I, 2002), h.12.

Pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang terbesar dalam rangka pengumpulan PAD. Daya pajak daerah merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Bisa dikatakan bahwa semakin tinggi daya pajak suatu daerah maka pendapatan daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Melalui peningkatan pendapatan daerah, maka secara bertahap tingkat kemandirian daerah akan semakin tinggi. Berikut disajikan mengenai perkembangan daya pajak daerah di Kabupaten Soppeng.

**Gambar 1.1 Perkembangan Daya Pajak Total di Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2014.**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 (diolah).

Pada gambar 1.1 menunjukkan fluktuasi upaya pajak daerah dalam peningkatan sumber penerimaan daerah di Kabupaten Soppeng. Hal menarik dari gambar tersebut adalah daya pajak total di tahun 2013 menunjukkan angka tertinggi yaitu sebesar 0,28% dibandingkan tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Sedangkan di tahun 2005 daya pajak total menunjukkan angka terendah yaitu hanya sebesar 0,17% dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Fakta empirik ini memberikan indikasi

agresifitas pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah, menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Penggalan pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara konvensional. Dua komponen inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari potensi yang dimiliki Kabupaten Soppeng.<sup>6</sup>

Kabupaten Soppeng saat ini telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang masih kurang. Tiap tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun prasarana seperti pembangunan jalan raya, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan lain-lain. Sehingga hal ini mendorong investor dalam membangun usahanya di Kabupaten Soppeng melalui sektor unggulan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi salah satu indikator PAD.

Pendapatan Asli Daerah dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah

---

<sup>6</sup> Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD). Kabupaten Soppeng.



daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Kontribusi besar yang diberikan dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor-sektor unggulan seperti sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pengolahan industri, dan sektor angkutan dan komunikasi dimana Kabupaten Soppeng didominasi oleh sektor-sektor unggulan tersebut. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut disajikan jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Soppeng.

**Tabel 1.2 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2014.**

| <b>Tahun</b> | <b>Konstan 2010<br/>(Juta Rupiah)</b> |
|--------------|---------------------------------------|
| 2005         | 2.725.047,95                          |
| 2006         | 2.905.686,91                          |
| 2007         | 3.061.836,98                          |
| 2008         | 3.299.363,44                          |
| 2009         | 3.523.906,69                          |
| 2010         | 3.716.824,50                          |
| 2011         | 3.983.418,80                          |
| 2012         | 4.259.550,60                          |
| 2013         | 4.567.987,10                          |
| 2014         | 4.876.746,70                          |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 (diolah).*

Pada tabel 1.2 menyatakan bahwa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Soppeng, secara umum dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 merupakan jumlah PDRB atas

dasar harga konstan paling rendah dibandingkan tahun-tahun sesudahnya yaitu hanya sebesar Rp 2.725.047,95 Triliun. Sedangkan di tahun 2014 menunjukkan jumlah PDRB atas dasar harga konstan paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 4.876,75 Triliun, dengan demikian dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Adam Smith menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi.<sup>7</sup>

Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Berikut adalah data jumlah penduduk yang tergolong usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng tahun 2005-2014.

---

<sup>7</sup> Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*, (Jurnal,2005).

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014.**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b> |
|--------------|-------------------------------|
| 2005         | 149.901                       |
| 2006         | 151.027                       |
| 2007         | 144.196                       |
| 2008         | 145.887                       |
| 2009         | 151.374                       |
| 2010         | 143.049                       |
| 2011         | 143.328                       |
| 2012         | 144.596                       |
| 2013         | 146.980                       |
| 2014         | 147.642                       |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 ( diolah.)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memasuki usia produktif di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 menunjukkan angka terendah yaitu hanya sebanyak 143.049 jiwa yang memasuki usia produktif, sedangkan di tahun 2009 menunjukkan angka tertinggi yaitu sebanyak 151.374 jiwa yang memasuki usia produktif.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat ditarik judul mengenai: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014.”**

#### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasar pada latar belakang maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng?
2. Apakah daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng?

### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD khususnya masalah daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam penelitian juga memberikan sumbangsih pikiran bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Otonomi Daerah***

Pengertian Otonomi Daerah secara etimologis yaitu berasal dari bahasa latin, “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi otonomi dapat diartikan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi berasal dari kata “autonomy” (Inggris). “Auto” artinya sendiri dan “Nomy” sama dengan “Nomos” yang berarti aturan atau Undang-Undang, jadi “autonomy” artinya mengatur sendiri. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerahnya sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak di mana diperoleh dari pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Dari berbagai rumusan Otonomi Daerah di atas, maka Otonomi Daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta bidang kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

---

<sup>1</sup> Hijrah Syahputra. *Analisis Determinan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tanjung Balai*, (Skripsi, 2007).

Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesehatan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah Otonomi Daerah selalu dikaitkan dengan keuangan daerah. Istilah otonomi keuangan ini sebenarnya tidak tepat, karena tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi sebuah wilayah di dalam sebuah Negara Kesatuan memiliki sistem keuangan yang otonom. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bukan mengatur otonomi Keuangan Daerah.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan alat dan sarana untuk membangun demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Adapun tujuan utama adanya desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:<sup>2</sup>

1. Untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat yang lebih baik.
2. Demi menjamin demokrasi dalam hal memaksimalkan partisipasi publik dalam setiap jenjang pengambil keputusan dan kebijakan publik dan memungkinkan kontrol serta pertanggungjawaban yang lebih baik.
3. Mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan rakyat setempat.

---

<sup>2</sup> Abdul Halim. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Ed.II, 2007). h. 205.

4. Untuk membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.
5. Pemangkasan rentang birokrasi dan mengurangi peluang korupsi.

Konsekuensi dari otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam membiayai program-program pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten/kota dituntut meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan potensi yang dimiliki.<sup>3</sup>

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah agar daerah yang bersangkutan mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Undang-undang yang mengatur mengenai alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan. Hal ini tidak bisa diartikan sebagai pembebanan dana pembangunan kepada daerah otonom secara sendiri-sendiri. Keberadaan sistem keuangan pemerintah daerah, tidak bisa dilepaskan dari daerah sistem keuangan negara secara

---

<sup>3</sup> Lilik Yunanto. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*, (Skripsi: 2010).

<sup>4</sup> Handayani Atiah. *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, (Skripsi, 2009).

keseluruhan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, kewenangan Pemerintah Pusat dan bukan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menentukan peraturan semena-mena kepada masyarakat karena dilindungi oleh negara. Implikasi dari hal ini adalah bahwa otonomi keuangan daerah harus melalui pos-pos tertentu yang diizinkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Unsur otonomi daerah terdiri dari 4 (empat), yaitu:<sup>5</sup>

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya Kepala Daerah, DPRD, dan Pegawai Daerah.
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah.
3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah.
4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (diluar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu:<sup>6</sup>

1. Kemampuan struktur organisasinya.

---

<sup>5</sup> Handayani Atiah. Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, (Skripsi, 2009).

<sup>6</sup> Emelia. Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kab. Lampung Timur, (Skripsi, 2006).



Struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah.

Aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan kejujuran dari aparaturnya daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah.

4. Kemampuan keuangan daerah.

Suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila pemerintah daerah tersebut mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan urgensi penelitian ini, maka suatu daerah dituntut kemampuannya dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat.

### ***B. Pembangunan Ekonomi Daerah***

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat bertambah. Dimana kenaikan

pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah suatu cara untuk memajukan dan memberikan kesejahteraan masyarakat yang merupakan usaha untuk menghilangkan suatu mata rantai dari lingkaran kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa bangsa Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah sewajarnya Indonesia melakukan pembangunan yang telah tercermin dalam GBHN yang antara lain berisikan tujuan pembangunan nasional dari pembangunan itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat yang bersuasana perikehidupan yang aman serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun masalah pembangunan merupakan suatu jalinan eksistensi dari masalah sosial dalam ekonomi. Oleh sebab itu kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi dilaksanakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat non ekonomi yaitu untuk melengkapi analisis yang ditinjau dari sudut ekonomi.

Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu dibarengi oleh pembangunan. Sehubungan dengan itu, istilah ekonomi pada umumnya dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi yang terdapat di negara-negara maju di mana struktur ekonominya yang sudah berindustri yang tidak mengalami perubahan struktural lagi, sedangkan pembangunan ekonomi berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang yang mengalami proses struktural dari keterbelakangan ke arah kemajuan dan modernisasi.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual dan penyegaran kehidupan budaya.<sup>7</sup>

Pengertian daerah dari aspek tinjauan ekonomi adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan kepada pembagian administrasi suatu negara. Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah (APBD) dan yang berasal dari masyarakat luar.

---

<sup>7</sup> Lia Amalia. *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1.

Pembangunan Daerah tidak akan terjadi dengan begitu saja, karena pembangunan di daerah baru akan berjalan jika sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislatif dan eksekutif di daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta DPRD-DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Otonomi Daerah memiliki sejumlah kewenangan, terutama 11 kewenangan wajib sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Kesebelas kewenangan wajib itu merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Yang diharapkan dari Pemerintah Daerah ada beberapa hal, antara lain:<sup>8</sup>

1. Fasilitas

Di samping fungsi yang lainnya, Fungsi Pemerintah Daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah terutama di bidang perekonomian.

2. Pemerintah Daerah harus kreatif

Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas dari para penyelenggara pemerintahan.

3. Politik lokal yang stabil

Masyarakat dan Pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Orang tidak akan mungkin mau menanamkan uangnya di suatu daerah dengan situasi politik

---

<sup>8</sup> Syaukani, Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur, 2007), h. 218.

lokal yang tidak stabil. Karena pemerintah tidak transparan dalam pembuatan kebijaksanaan publik maka hal itu kemudian mendorong terjadinya gerakan protes dan tentu saja akan mengganggu jalannya pemerintahan.

4. Pemerintah Daerah harus menjamin kesinambungan berusaha kalangan pengusaha asing maupun domestik seringkali merasa terganggu dengan sikap kalangan politisi dan birokrasi lokal yang mencoba mengutak-utik apa yang sudah disepakati sebelumnya. Bagi kalangan pengusaha Asing, satu kali sebuah kontrak disepakati dan ditandatangani maka hal itu mempunyai ikatan hukum yang harus dihormati, kalau sampai membatalkan sebuah kontrak maka implikasi hukumnya besar sekali terutama dalam bisnis internasional. Karena itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas aparatnya khususnya jika berhubungan dengan bisnis internasional.

5. Pemerintah Daerah harus komunikatif dengan LSM/ NGO, terutama dalam bidang Pemburuhan dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah hendaknya menjadi jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh. Pemerintah Daerah juga harus lebih sensitif dengan masalah atau isu lingkungan hidup serta gender. Dengan demikian, sikap-sikap radikal dari kalangan buruh yang didukung oleh LSM/NGO akan dapat diakomodasi, dan pada akhirnya dua kepentingan akan dapat terjembatani.

### ***C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Dari Aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:<sup>9</sup>

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Sejak awal Repelita II telah terjadi perubahan penting pada alokasi subsidi pusat bagi daerah-daerah di Indonesia. Perubahan penting ini berupa dihilangkannya kaitan antara besarnya subsidi dan besarnya pajak ekspor yang diterima masing-masing provinsi sebelum tahun 1969. Selain itu beberapa subsidi khusus mulai dilaksanakan bagi pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan,

---

<sup>9</sup> Lincolin Arsyad. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE, Ed. II. 2010), h. 107-108.

sedangkan subsidi pembangunan yang diterima kabupaten sejak tahun 1969 tetap diteruskan. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini subsidi pembangunan, dari pusat ke daerah-daerah, menunjukkan peningkatan yang berarti per kapitanya.<sup>10</sup>

Daerah-daerah berotonom, yaitu daerah-daerah yang leluasa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sangat terlihat pada semua negara di seluruh dunia. Inilah yang menyebabkan negara baik besar maupun kecil, menjamin hak ini dari daerahnya masing-masing dengan menanamkan daerah-daerah itu “Negara” yaitu “Negara Bagian” dalam bentuk “Negara Federasi” atau “Bondstaat” atau “Bundestaat” atau “Negara Serikat”.<sup>11</sup>

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Kelompok Pendapatan, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.
2. Jenis pendapatan, misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari

<sup>10</sup> Anne Both dan Peter McCawley. *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 202.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), h. 116.

<sup>12</sup> Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

Menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, “sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pajak daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”.

### 1. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat memaksa terhadap terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>13</sup>

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber

---

<sup>13</sup> Hamdan Aini. *Perpajakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 1.

keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>14</sup>

Dari batasan atau definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

- a. Iuran masyarakat kepada Negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa balas jasa secara langsung
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Ushr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9: 41 dan QS An-Nisa/4: 29.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahan:

*“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS At-Taubah : 41).<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 5.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Pena Pundi Aksara:2002), hal.194.

Ayat tersebut menjelaskan rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa dan negaranya untuk mencapai cita-cita yang sama yaitu menjadi Negara yang aman dan sentosa. Nasionalisme dalam konteks bernegara ini khususnya Indonesia, perlu diwujudkan dalam menjaga prinsip-prinsip atau nilai-nilai sebagai berikut: persatuan, cinta tanah air, patriotisme, persamaan keturunan, pluralisme dan kebebasan. Dalam ayat ini tidak dijelaskan secara spesifik tentang pajak maupun retribusi akan tetapi sudah memuat semuanya dalam rasa nasionalisme yang telah dijelaskan sebelumnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa:29).<sup>16</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan atau jalan yang batil. Pajak merupakan salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

Rasulullah SAW menjelaskan pula tentang pajak dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ رُو  
يُفَيْعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُسُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>16</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Pena Pundi Aksara:2002), hal.83.

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي نَارٍ

Terjemahan :

*“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka’[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930].*

Berkata Syaikh Al-Albani rahimahullah : “(Karena telah jelas keabsahan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi’ah dari Qutaibah) maka aku tetapkan untuk memindahkan hadits ini dari kitab Dha’if Al-Jami’ah Ash-Shaghir kepada kitab Shahih Al-Jami, dan dari kitab Dha’if At-Targhib kepada kitab Shahih At-Targhib”.

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti.”<sup>17</sup>

Pada ayat dan hadits yang telah disebutkan menjelaskan bahwa hukum pajak adalah haram karena di dalam islam tidak ada yang namanya pajak melainkan zakat. Pembagian zakat di dalam islam sudah ditentukan mulai dari zakat harta, zakat barang temuan dan zakat fitrah. Ketika seorang pemimpin menarik pajak pada masyarakat yang sudah membayar semua jenis zakat maka hal ini dapat merugikan dan menjadikan masyarakat jatuh miskin. Padahal tugas seorang pemimpin adalah menentramkan dan memakmurkan masyarakatnya. Hal inilah yang dimaksud di dalam hadits yang telah diterangkan sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi.

## 2. Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMD).

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

***D. Daya Pajak (Tax Effort).***

Daya pajak (*tax effort*) daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang saat ini masih didominasi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian digunakan juga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mengetahui kinerja (*performance*) PAD, terutama yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat menggambarkan rasio antara PAD dengan pendapatan masyarakat dalam periode yang sama.

Daya pajak (*tax effort*) dapat juga digunakan untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas (kemampuan) pajaknya. Daya pajak adalah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajaknya (*tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari pajak (*tax base*) dikalikan tarifnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suparmoko. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, Ed.I,2002), h.12.

Upaya Pajak (*tax effort*) menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya.<sup>19</sup>

Membandingkan rasio antara pajak dan potensi antar daerah disebut sebagai prestasi pajak (*tax performance*). Daya pajak merupakan kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Dimana daya pajak merupakan rasio pajak terhadap basis pajak. Sebagai proksi oleh basis pajak, digunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin besar nilai daya pajak (*tax effort*) maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjaring dananya melalui pajak.

Upaya pengumpulan pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dibagi dengan kemampuan bayar pajak. Kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).<sup>20</sup>

Dana transfer pemerintah pusat dapat mempengaruhi daya pajak daerah melalui efek substitusi dan efek stimulasi. Efek substitusi ditemukan jika dana

---

<sup>19</sup> Lalu Karyawan. *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*, (Tesis, 2002).

<sup>20</sup> Nick Devas, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey and Roy Kelly. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), h. 57.



transfer pemerintah pusat mengurangi daya pajak daerah, dengan kata lain terjadi penurunan dalam pengumpulan pajak. Daerah menjadi malas menggali potensi daerah melalui pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh karena daerah mengandalkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dana transfer dijadikan substitusi pajak daerah. Sedangkan efek stimulasi terjadi jika dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan daya pajak daerah. Dana transfer ini dapat merangsang peningkatan pajak.

Permasalahan pajak ada empat, yaitu:<sup>21</sup>

1. Kesadaran pajak yang rendah di kalangan masyarakat, yang diperburuk oleh minimnya upaya pengenalan pajak.
2. Masih tingginya kesulitan riil pengusaha pajak maupun persepsinya, yang diperburuk oleh kualitas pelayanan pajak yang rendah.
3. Ketiadaan penggalian potensi pajak secara optimal, terutama akibat kelemahan kinerja dan etos aparat pelaksana pemungutan pajak.
4. Politisasi dan korupsi pajak.

#### ***E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)***

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan

---

<sup>21</sup> Faisal Basri dan Hasan Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 279.

yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).<sup>22</sup>

PDRB adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau provinsi selama kurun waktu satu tahun.<sup>23</sup> Sedangkan dalam pendapat lain mengemukakan bahwa PDRB sebagai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu daerah tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu dan dalam jangka waktu satu tahun.<sup>24</sup>

PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan jasa tidak langsung tadi dalam pergerakan sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto sehingga PDRB atas harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi.

---

<sup>22</sup> Haryanto dalam Arief Eka Atmaja. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Semarang*, (Skripsi, 2011).

<sup>23</sup> Losina Purnastuti dan Rr. Indah Mustikawati. *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 113.

<sup>24</sup> Payaman J. Simanjuntak. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: FSUI, 2001), h. 103.

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu: pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

2. Cara pengeluaran.

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti:

- a. Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang.

---

<sup>25</sup> Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, 2012), h. 34.

- b. Konsumen pemerintah.
- c. Pembentukan modal tertentu domestik bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor neto

### 3. Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan.

### ***F. Jumlah Penduduk.***

Jumlah penduduk merupakan masyarakat yang tinggal di suatu daerah, secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, jumlah penduduk adalah kumpulan manusia menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula.

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus

juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.<sup>26</sup> Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.<sup>27</sup>

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (*capital stok*) yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil

---

<sup>26</sup> Agus Widarjono. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas*, (Jurnal, 1999).

<sup>27</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2004),

yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*) yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal.

David Ricardo juga mengemukakan pendapatnya bahwa bila jumlah penduduk dan akumulasi modal bertambah secara terus menerus, maka ketersediaan tanah (lahan) yang subur akan berkurang jumlahnya atau semakin langka. Maka akibatnya sewa tanah yang subur akan lebih tinggi daripada tanah yang kurang subur. Pengolahan tanah yang subur akan memperoleh penghasilan dan keuntungan yang tinggi, sehingga mampu membayar sewa tanah yang tinggi.

Menurut Robert Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus konsekuensinya adalah permintaan akan bahan pangan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan tingkat pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung, artinya akan terjadi ketimpangan yang semakin besar antara jumlah penduduk dan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak terhadap semakin menurunnya tingkat kemakmuran penduduk.<sup>28</sup>

Menurut Leibenstein di dalam bukunya *A Theory of Economic-Demographic Development* mengemukakan bahwa konsep *the low-level equilibrium trap* yang menjelaskan perubahan demografi di negara-negara berkembang. Suatu kenaikan sedikit dalam pendapatan akan meningkatkan jumlah penduduk dan persediaan

---

<sup>28</sup>

Rahardjo Adisasmita.. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 24.

tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menghapuskan pertumbuhan modal, produktifitas dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya.<sup>29</sup>

Jumlah penduduk di suatu daerah atau suatu negara akan selalu berubah-ubah. Jumlah penduduk yang terus berubah disebabkan oleh 3 hal pokok yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya:

1. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan.
2. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang penduduknya.
3. Tingginya angka urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan kumuh di kota-kota besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin kota.

---

<sup>29</sup>

Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosir, *Dasar-Dasar Demografi* (Jakarta:Salemba Empat,2010),

h.17.

4. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada kerawanan sosial.

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 hingga 64 tahun, penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 64 tahun dianggap tidak produktif lagi karena kemampuannya tidak bisa optimal dalam melakukan pekerjaan. Banyaknya penduduk usia produktif diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian, baik sebagai tenaga kerja berkualitas maupun sebagai pembuka lapangan kerja yang akan menyerap angkatan kerja. Dengan demikian, beban tanggungan terhadap penduduk usia dini dan usia lanjut akan semakin rendah.

#### ***G. Hubungan Antar Variabel***

##### ***1. Hubungan Daya Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).***

Daya pajak adalah kemampuan daerah untuk menarik dan mengumpulkan pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Meningkatnya daya pajak di suatu daerah berarti terjadi peningkatan pendapatan asli daerah. Karena pajak dan PAD memiliki hubungan fungsional yang positif. Adanya peningkatan PAD berarti juga terdapat tambahan dana untuk melaksanakan pembangunan sarana publik yang dicantumkan dalam APBD daerah. Berdasarkan pada hal, maka jika daya pajak meningkat berarti pajak daerah akan bertambah dan selanjutnya akan menaikkan PAD secara relatif.



Berdasarkan pada analogi tersebut dapat dilihat hubungan antara daya pajak dengan PAD. Jika daya pajak meningkat, maka PAD meningkat karena penerimaan pajak meningkat. Sebaliknya jika daya pajak menurun, berarti penerimaan pajak juga menurun maka jumlah PAD akan menurun. Karena sebagian besar penyumbang PAD berasal dari pajak daerah. Hubungan antara daya pajak dan PAD memerlukan interval waktu (*lag*) untuk mempengaruhi, dengan kata lain daya pajak pada tahun berjalan akan mempengaruhi PAD pada tahun berikutnya.

## ***2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).***

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

## ***3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah***

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi.

Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

#### ***H. Penelitian Terdahulu***

Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Berdasarkan penelitiannya bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat. Hal ini didukung oleh tingkat koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,971. Dari ketiga variabel independen (pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB) yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk sebesar 8,049.<sup>30</sup>

Analisis Determinan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tanjung Balai mengemukakan bahwa menurut data dan analisis yang dilakukan oleh penulis, terdapat satu hubungan antara pertumbuhan tingkat penduduk, PDRB, Bantuan Pemerintah Pusat dan hasil pendapatan asli daerah tahun sebelumnya dengan pendapatan asli daerah pada tahun berjalan. Dengan demikian maka pembangunan di daerah hendaknya harus dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>

Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jurnal,2005).

<sup>31</sup>

Hijrah Syahputra. Analisis Determina PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tanjung Balai, (Skripsi,2007).

Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. Berdasarkan penelitiannya bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang karena laju inflasi diperlukan dalam pertimbangan tarif yaitu dengan cara penetapan pada tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat *flat*. Meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah, hal ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Karena laju inflasi hanya berguna sebagai pertimbangan perubahan tarif.<sup>32</sup>

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD) Di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara individual, variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Yang memiliki pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang adalah jumlah penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 5,742.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Eni Aryanti dan Iin Indarti. *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2000-2009 di Kota Semarang*, (Jurnal, 2011).

<sup>33</sup> Arief Eka Atmaja. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang*, (Skripsi, 2011).

Pengaruh Daya Pajak (*Tax Effort*) dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa secara umum pengaruh daya pajak (*tax effort*) dan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung memiliki hubungan yang rendah dan diterima. Pengaruh daya pajak (*tax effort*) dan efektifitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung tidak semua dipengaruhi dari daya pajak (*Tax Effort*) dan efektifitas pemungutan pajak reklame, namun dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibuat pemetaan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama Peneliti</b>                                 | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Variabel</b>  | <b>Hasil</b>   |
|--|---|--|--|
| 1. Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu (2005) | Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri | -Variabel dependen: PAD<br>-Variabel independen: Pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat. Hal ini didukung olehtingkat koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,971. Variabel yang paling berpengaruh adalah penduduk sebesar 8,041. |

<sup>34</sup>

Dwi Fitria Rohman. *Pengaruh Daya Pajak (Tax Effort) dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung* (Skripsi,2015).

|                                       |  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 2. Hijrah Syahputra (2007)            | Analisis Determinan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tanjung Balai  | -Variabel dependen: PAD<br>-Variabel independen: Pertumbuhan tingkat penduduk, PDRB, bantuan pemerintah dan hasil pendapatan asli daerah tahun sebelumnya | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa menurut data dan analisis yang dilakukan oleh penulis terdapat suatu hubungan antara pertumbuhan tingkat penduduk, PDRB, bantuan pemerintah pusat, dan hasil pendapat daerah tahun sebelumnya dengan pendapatan asli daerah pada tahun berjalan. |
| 3. Eni Aryanti dan Iin Indarti (2011) | Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang                             | -Variabel dependen: PAD<br>-Variabel Independen: PDRB, jumlah penduduk dan inflasi  | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan karena inflasi hanya berguna sebagai pertimbangan perubahan tariff                                  |
| 4. Arief Eka Atmaja (2011)            | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang                                 | -Variabel dependen: PAD<br>-Variabel independen: pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB   | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa secara bersama-sama variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.   |
| 5. Dwi Fitria Rohman (2015)           | Pengaruh Daya Pajak (Tax Effort) dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung | -Variabel dependen: PAD<br>-Variabel independen: daya pajak daya pajak dan efektivitas pemungutan pajak reklame   | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa secara umum pengaruh daya pajak ( <i>tax effort</i> ) dan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung memiliki hubungan yang rendah dan diterima.   |

Penelitian yang telah dilakukan oleh kelima peneliti telah memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penelitian ini penulis akan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng. Di mana penelitian ini akan diambil beberapa variabel yang telah diteliti kemudian menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan faktor daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng tahun 2005-2014.

### ***I. Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (sebagai variabel terikat) yang dipengaruhi oleh daya pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk (sebagai variabel bebas).

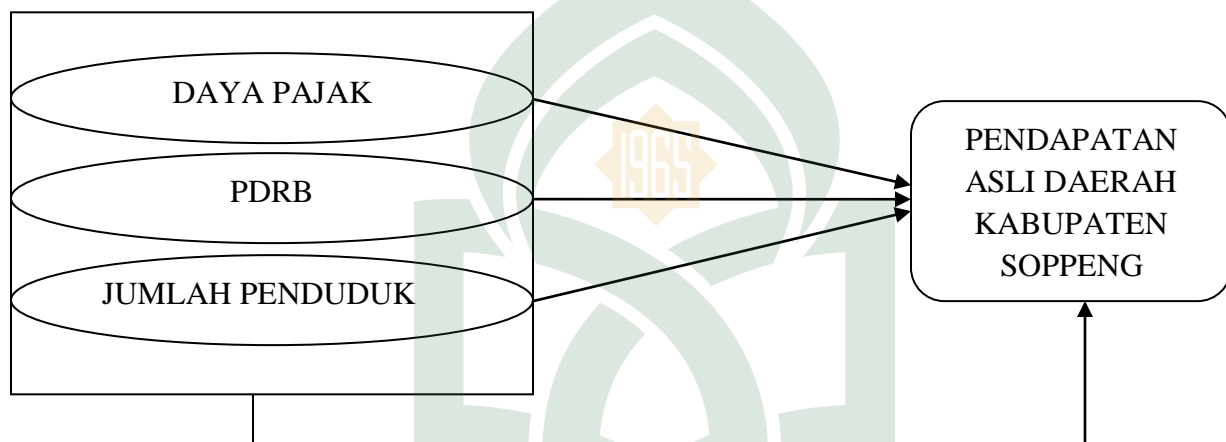
Faktor daya pajak (*tax effort*) dimasukkan dalam penelitian ini karena meningkatnya daya pajak suatu daerah berarti akan menambah Pendapatan Asli Daerah, pajak dan PAD mempunyai hubungan fungsional positif.

Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasukkan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dan PDRB merupakan total

nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau provinsi selama kurun waktu satu tahun.

Jumlah Penduduk dimasukkan dalam penelitian ini karena pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



Dari kerangka tersebut dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Soppeng terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerahnya di antaranya daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk. Ketiga faktor ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk membuktikan bahwa ketiga faktor ini berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng.

### ***J. Hipotesis***

Berdasarkan pemikiran yang terkandung dalam masalah pokok, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

1. Diduga bahwa daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng.
2. Diduga bahwa daya pajak (*tax effort*), PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng.

#### ***K. Defenisi Operasional.***

Defenisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Defenisi operasional dari masing-masing variabel adalah:

1. Daya Pajak (*tax effort*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya pajak (*tax effort*) di Kabupaten Soppeng yang dinyatakan dalam persen, yaitu upaya pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk mengoptimalkan potensi PAD yang saat ini masih di dominasi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Retribusi Daerah. Data diambil dari Badan Pusat Statistik.
2. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Soppeng atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam rupiah. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.
3. Jumlah penduduk yang dimaksud di sini adalah jumlah penduduk yang memasuki usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng yang dinyatakan dalam jiwa. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti



meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

4. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Soppeng yang dinyatakan dalam rupiah. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Dikatakan kuantitatif karena pada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena.<sup>1</sup> Metode ini juga menggunakan alat bantu kuantitatif berupa *software computer (evIEWS 6)* dalam mengelola data tersebut.

Pada penelitian ini lokasi yang diambil adalah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diambil adalah data pendapatan asli daerah, daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk dapat diperoleh dari BPS Kabupaten Soppeng, Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Soppeng dan sumber-sumber terkait dalam kurun waktu 2005-2014.

##### ***B. Jenis dan Sumber Data***

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>2</sup> Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari

---

<sup>1</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 24.

<sup>2</sup> Indriantoro, *Metodologi Untuk Aplikasi dan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.147.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng dan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng.

### ***C. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Dimana studi pustaka merupakan metode pengumpulan data untuk mendukung suatu teori sehingga tidak diperlukan teknik sampling maupun kuesioner. Sebagai pendukung, data juga diperoleh dari literatur-literatur atau buku-buku dan laporan-laporan serta *browsing* internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait dengan penulisan ini di Kabupaten Soppeng, setelah diberikan izin penelitian dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut akan diolah dan digunakan sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesa yang telah dikemukakan.<sup>3</sup>

### ***D. Metode Analisis Data***

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuadrat Terkecil Biasa atau *Ordinary Least Square (OLS)*. Dimana dalam metode ini *Ordinary Least Square (OLS)* adalah

---

<sup>3</sup> Indriantoro, *Metodologi Untuk Aplikasi Dan Bisnis* (Yogyakarta : BPFE, 1999), h. 103.

untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan data runtut waktu (*time series*). Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots 3.1$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots 3.2$$

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu \dots \dots \dots 3.3$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X<sub>1</sub> = Daya Pajak (%)

X<sub>2</sub> = PDRB (Rp)

X<sub>3</sub> = Jumlah Penduduk (orang)

α = Koefisien Konstanta

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> = Parameter Estimasi Regresi

μ = *Error Term*

Upaya Pajak adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui daya bayar masyarakat adalah *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) juga akan meningkat dan ini berarti bahwa administrasi

---

<sup>4</sup> Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, Ed.I. 2008), h.199.

penerimaan daerah dapat meningkatkan upaya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.<sup>5</sup>

Upaya Pajak dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Total Upaya Pajak: } \frac{\text{penerimaan pajak}}{\text{kemampuan bayar}} = \frac{\text{total pajak tahun}_t}{\text{total PDRB tahun}_t} \times 100\%$$

Untuk menguji bisa atau tidak regresi tersebut digunakan dan untuk menguji hipotesis yang dilakukan maka diperlukan uji statistik sebagai berikut.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini dikhususkan pada penelaahan gejala heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas.

#### a. Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya varians yang tidak sama dari setiap unsur gangguan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>6</sup>

Untuk membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka pada penelitian ini akan digunakan uji *white heteroscedasticity*. Uji ini dilakukan dengan meregresikan

---

<sup>5</sup> Lilik Yunanto. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*, (Skripsi:2010).

<sup>6</sup> Puput Melati. *Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Terhadap Investasi Industri Kota Semarang*, (Skripsi:2011).

residual kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen kemudian ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen.

Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

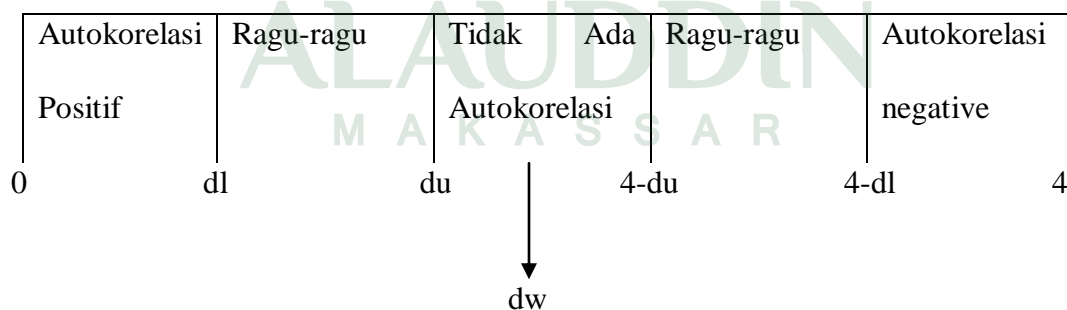
$H_0 : p \geq 0,05$  maka tidak ada heteroskedastisitas

$H_1 : p \leq 0,05$  maka ada heteroskedastisitas

Jika probability  $\leq 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima begitu pula sebaliknya jika probability  $\geq 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### b. Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Jika terdapat autokorelasi, maka parameter yang diestimasi akan bias dan variannya tidak minimal. Dalam penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode Durbin Watson (DW test). Nilai DW yang diperoleh dibandingkan dengan dL pada tabel statistik dari Durbin Watson.



Kemudian pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, didasarkan atas hal berikut ini :

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti terjadi autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti terjadi autokorelasi negative.
- 4) Bila DW terletak di antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Apabila terjadi pelanggaran pada asumsi ini maka tindakan perbaikan model adalah dengan melakukan transformasi dengan cara mensubstitusi nilai  $p$ , dimana nilai  $p$  dihitung berdasarkan nilai  $d$  pada model asli. Nilai  $p=1-(d/2)$ , dimana nilai  $d$  = nilai Durbin Watson.

**Tabel 3.1 Kriteria pengujian Autokorelasi**

| Null Hipotesis                                      | Hasil Estimasi               | Kesimpulan           |
|---|------------------------------|----------------------|
| $H_0$   | $0 < dw < dl$                | Tolak                |
| $H_0$   | $dl \leq dw \leq du$         | Tidak ada kesimpulan |
| $H_1$   | $4 - dl < dw < 4$            | Tolak                |
| $H_1$   | $4 - du \leq dw \leq 4 - dl$ | Tidak ada kesimpulan |
| Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif | $Du < dw < 4 - du$           | Diterima             |

Pada pengujian autokorelasi juga akan digunakan uji *Serial Correlation LM Test*. Uji ini dilakukan dengan cara mencari nilai probability dari  $\text{Obs} \times R\text{-squared}$  dan membandingkannya dengan tingkat kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ), dengan kriteria:

$H_0 : p \geq 0,05$  maka tidak ada autokorelasi

$H_1 : p \leq 0,05$  ada autokorelasi

Jika  $\text{probability} \leq 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, begitu pula sebaliknya, jika  $\text{probability} \geq 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### c. Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel bebasnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Menurut Damodar Gujarati, dikatakan bahwa konsekuensi dari multikolienaritas sempurna di antara X, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini akan digunakan uji *correlations test*. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model adalah dengan melihat matriks koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

---

<sup>7</sup> Damodar Gujarati. *Ekonometrika Dasar (terjemahan)*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 157.



## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan  $R^2$ . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $R^2$  kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tidak ada keterkaitan.
- b. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1 (satu), berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan

### b. Uji F (Simultan)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah :

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

$H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Pengujian ini dilakukan sebagai berikut :

Apabila  $F$  lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan terima  $H_0$  tolak dan  $H_1$  diterima yang artinya semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas atau variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Apabila  $F$  lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan  $H_0$  terima dan  $H_1$  ditolak yang artinya semua variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan atau variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

### c. Uji t (Parsial)

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah secara individual variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Hipotesis yang dilakukan sebagai berikut :

$H_0 : b_i = 0$ , artinya suatu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

$H_1 : b_i > 0$ , artinya suatu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Pengujian ini dilakukan sebagai berikut :

Apabila nilai probability lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas atau variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Apabila nilai probability lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya suatu variabel bebas merupakan penjelas yang

signifikan dan positif terhadap variabel tak bebas atau variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng**

##### **1. Kondisi Topografi dan Geografis.**

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara  $4^{\circ}06'$  Lintang Selatan dan  $4^{\circ}32'$  Lintang Selatan dan antara  $119^{\circ}47' 18''$  Bujur Timur dan  $120^{\circ}06' 13''$  Bujur Timur. Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walennae yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Dengan luas daratan  $700 \text{ km}^2$  berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya  $800 \text{ km}^2$  berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut.

Gunung yang tertinggi yang di dalam wilayah Kabupaten Soppeng yaitu gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m. Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain : Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai walennae, sungai tersebut melalui Dusun Umpungeng, Dusun Langkemme, Dusun Cenranae, Dusun Soga ke Sungai Walennae dan di Kabupaten Soppeng berpenduduk sebanyak kurang lebih 225.700 jiwa (2014).

Secara geografis terletak diantara koordinat  $04^{\circ}06'00''$  -  $04^{\circ}32'00''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}47'18''$  -  $120^{\circ}06'13''$  Bujur Timur dengan luas wilayah  $1.500 \text{ km}^2$

berada di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 179 km yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat  $\pm$  4 jam.

Dengan batas wilayah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Kabupaten Soppeng secara administratif terbagi atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Marioriawa dan terdiri dari 21 Kelurahan dan 49 Desa.

**Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng, dalam angka 2015.**

| Kecamatan     | Luas<br>(km <sup>2</sup> ) | Persentase<br>(%) | Banyak Desa/Kelurahan |           |           |
|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|               |                            |                   | Desa                  | Kelurahan | Jumlah    |
| Marioriwawo   | 300                        | 20,00             | 11                    | 2         | 13        |
| Lalabata      | 278                        | 18,50             | 3                     | 7         | 10        |
| Liliriaja     | 96                         | 6,40              | 5                     | 3         | 8         |
| Ganra         | 57                         | 3,80              | 4                     | 0         | 4         |
| Citta         | 40                         | 2,70              | 4                     | 0         | 4         |
| Lilirilau     | 187                        | 12,50             | 8                     | 4         | 12        |
| Donri-donri   | 222                        | 14,80             | 9                     | 0         | 9         |
| Marioriawa    | 320                        | 21,30             | 5                     | 5         | 10        |
| <b>Jumlah</b> | <b>1.500</b>               | <b>100</b>        | <b>49</b>             | <b>21</b> | <b>70</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng (diolah) 2016.

Dilihat dari tabel di atas Kabupaten Soppeng memiliki 49 desa dan 21 kelurahan dari 8 kecamatan. Kecamatan Marioriwawo merupakan kecamatan yang

paling luas di antara kecamatan lain yang berada di Kabupaten Soppeng. Luasnya adalah 300 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Citta merupakan kecamatan yang paling sempit di antara kecamatan lainnya yang luasnya hanya memiliki luas 40 km<sup>2</sup>. Di kecamatan ini terdiri dari 4 desa dan tidak mempunyai kelurahan.

## **2. Kondisi Demografi**

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 tercatat sebanyak 225.709 jiwa yang terdiri dari laki-laki 106.206 jiwa dan perempuan 119.503 jiwa. Penduduk tersebut tersebar diseluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan kepadatan 150 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Liriaja yaitu sekitar 283 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 88 jiwa/km<sup>2</sup>.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan dan produktif dapat menjadi potensi dalam pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar berdampak langsung terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian akan membantu dalam kelancaran segi perekonomian dan pembangunan di wilayah Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 147.642 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan penduduk usia

produktif di Kabupaten Soppeng dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 146.174 orang.

### **3. Kondisi Ekonomi Soppeng**

Bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya seperti Pare-pare, Pangkep, Sidrap dan Wajo yang mempunyai kekayaan alam dari laut karena berada di sekitar perairan laut, sumber kekayaan Kabupaten Soppeng relatif lebih sedikit. Akan tetapi karena Kabupaten Soppeng tidak berada di sekitar perairan laut maka tanah yang dimilikinya memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Dapat kita lihat dari sektor pertanian yang dimilikinya mempunyai pendapatan yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya.

Kondisi yang seperti ini menjadikan Kabupaten Soppeng secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerja sama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling memperkuat daerah-daerah sekitarnya, terutama dengan daerah yang mempunyai hasil pertanian rendah.

Perekonomian Soppeng pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Soppeng tahun 2014 mencapai 6,76% sedangkan pada tahun 2013 laju pertumbuhannya sebesar 7,24%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 12,62%. Sementara itu seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

## **B. Perkembangan Daya Pajak, PDRB dan Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014.**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, maka dapat digambarkan variabel-variabel yang masuk dalam penelitian ini secara lengkap apakah variabel independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen. Adapun variabel dependen dan variabel independen yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Dengan kata lain bahwa apabila kontribusi PAD terhadap APBD besar maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

PAD merupakan barometer utama atas suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. Ketergantungan kepada subsidi dari pemerintah yang harus diminimalkan, sehingga nantinya PAD yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi sumber keuangan terbesar dalam PAD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi, *Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan Asli daerah di Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana (Jurnal, 2014).



Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, maka sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali secara maksimal. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama menjadi unsur utama dalam PAD. Berikut adalah data PAD di Kabupaten Soppeng periode 2005-2014.

**Tabel 4.2 Perkembangan PAD di Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 10 tahun (2005-2014).**

| <b>Tahun</b> | <b>PAD (rupiah)</b> | <b>Pertumbuhan (%)</b> |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 2005         | 7.085.151.214,00    | -                      |
| 2006         | 11.266.106.312,36   | 59,01                  |
| 2007         | 15.821.801.661,30   | 40,44                  |
| 2008         | 17.460.780.984,00   | 10,35                  |
| 2009         | 16.089.970.808,00   | -7,85                  |
| 2010         | 20.393.023.061,00   | 26,74                  |
| 2011         | 21.551.766.287,00   | 5,68                   |
| 2012         | 25.694.588.261,47   | 19,22                  |
| 2013         | 40.096.283.908,00   | 56,05                  |
| 2014         | 60.389.274.523,00   | 50,61                  |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 (diolah)

Pada tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 dilihat bahwa PAD sebesar 10,35% kemudian terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 7,85%. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi Indonesia untuk bertahan dari segala macam gangguan perekonomian dunia mulai dari krisis moneter hingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dimana hal

ini berdampak pada pendapatan asli daerah karena ketergantungan fiskal berupa subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh keterbatasan PAD.<sup>2</sup>

Ketergantungan PAD terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga dialami oleh Kabupaten Soppeng sehingga PAD yang terjadi di tahun 2009 mengalami penurunan. Kemampuan yang masih terbatas dalam hal mengelola sumber-sumber pendapatannya menyebabkan Kabupaten Soppeng mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Setelah mengalami penurunan di tahun 2009, PAD di Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan di tahun 2010 sampai pada tahun 2014 yang mencapai 50,61%. Di tahun 2010 mulai kembali mengalami peningkatan disebabkan oleh retribusi daerah dan penerimaan juga mengalami peningkatan.

## **2. Daya Pajak (*Tax Effort*).**

Daya pajak (*tax effort*) daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang saat ini masih didominasi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian digunakan juga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Upaya pengumpulan pajak dilakukan dengan perbandingan penerimaan pajak dibagi dengan kemampuan bayar pajak. Kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

---

<sup>2</sup> Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi, *Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan Asli daerah di Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana (Jurnal, 2014).

Menurut Susanti daya pajak merupakan kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Dimana daya pajak merupakan rasio pajak terhadap basis pajak. Sebagai proksi oleh basis pajak, digunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin besar nilai daya pajak (*tax effort*) maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjaring dananya melalui pajak.<sup>3</sup>

Menurut Syahputra yang dikemukakan oleh Rohman, nilai daya pajak berkisar antara 0 sampai 1, semakin besar nilai daya pajak menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menjaring potensi daerah melalui pajak, dengan kata lain rata-rata kontribusi pajak mempunyai perbandingan yang tinggi terhadap PDRB.<sup>4</sup> Berikut adalah data data pajak di Kabupaten Soppeng periode 2005-2014.

**Tabel 4.3 Perkembangan Daya Pajak Total di Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 10 tahun (2005-2014).**

| Tahun | Daya Pajak Total (%) |
|-------|----------------------|
| 2005  | 0,17                 |
| 2006  | 0,18                 |
| 2007  | 0,18                 |
| 2008  | 0,18                 |
| 2009  | 0,22                 |
| 2010  | 0,19                 |
| 2011  | 0,22                 |
| 2012  | 0,25                 |
| 2013  | 0,28                 |
| 2014  | 0,21                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 (diolah).

<sup>3</sup> Handayani Atiah. *Analisis Pengaruh Tranfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Semarang: Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan. Universitas Diponegoro, (Skripsi, 2009).

<sup>4</sup> Dwi Fitria Rohman. *Pengaruh Daya Pajak (Tax Effort) dan Efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)*, (Skripsi: 2015).

Pada tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa daya pajak total dalam peningkatan sumber penerimaan daerah di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2005 sampai pada tahun 2009, kondisi daya pajak mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan daya pajak total. Berdasarkan data dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, di tahun 2010 dana perimbangan yang masuk ke Kabupaten Soppeng tergolong banyak yaitu menghampiri 2 Juta rupiah dan termasuk penerima terbanyak ke tujuh dari seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Menurut Sagbas dan Saruc peningkatan dan penurunan daya pajak dapat dipengaruhi oleh dana transfer pemerintah pusat melalui efek substitusi dan efek stimulasi. Efek substitusi ditemukan jika dana transfer pemerintah pusat mengurangi daya pajak daerah. Dengan kata lain terjadi penurunan dalam pengumpulan daya pajak. Daerah menjadi malas menggali potensi daerah melalui pajak daerah. Hal ini disebabkan karena daerah mengandalkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dana transfer dijadikan substitusi pajak daerah. Sedangkan efek stimulasi terjadi jika dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan daya pajak daerah. Dana transfer pemerintah ini dapat merangsang peningkatan pajak daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Handayani Atiah. *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah ( Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, (Skripsi:2009).

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang digunakan dan dinilai menggambarkan kinerja ekonomi Kabupaten Soppeng adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai sektor produksi di wilayah Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu satu tahun.

Sektor-sektor produksi tersebut terdiri dari 9 sektor yaitu: (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalan, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Transporasi dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, (9) dan Lain-lain termasuk jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Namun PDRB yang tercantum dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bahrul Ulum Rusydi. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2008)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro .Semarang, (Skripsi, 2010).

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.<sup>7</sup>

Data PDRB atas dasar harga konstan yang dikeluarkan oleh BPS menggunakan beberapa tahun dasar, diantaranya adalah tahun dasar 2000 dan tahun dasar 2010. Sehingga untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, perlu dilakukan penyamaan tahun dasar. Saat ini tahun dasar yang digunakan BPS adalah tahun dasar 2010, untuk itu perlu disamakan tahun dasarnya menjadi tahun 2010 agar lebih mudah dan representatif dengan keadaan ekonomi saat ini. Penyamaan tahun dasar (*backcasting*) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$X_{i-1,2010} = \frac{X_{i-1,2000}}{X_{i,2000}} \times X_{i,2010}$$

Dimana:

$X_{i-2010}$  = PDRB tahun  $i-1$  dengan tahun dasar 2000 yang di-backcast menjadi PDRB tahun dasar 2010

$X_{i-1,2000}$  = PDRB tahun  $i-1$  dengan tahun dasar 2000

$X_{i,2000}$  = PDRB tahun  $i$  dengan tahun dasar 2000

---

<sup>7</sup> Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jurnal, 2005).

$$X_{i,2010} = \text{PDRB tahun } i \text{ dengan tahun dasar 2010}$$

Berikut adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2000 dan 2010 di Kabupaten Soppeng.

**Tabel 4.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 10 tahun (2005-2014) (dalam juta rupiah).**

| Tahun     | Konstan 2000<br>(Juta Rupiah) | Pertumbuhan<br>(%) | Konstan 2010<br>(Juta Rupiah) | Pertumbuhan<br>(%) |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2005      | 894.323,52                    | -                  | 2.725.047,95                  | -                  |
| 2006      | 953.606,76                    | 6,6                | 2.905.686,91                  | 6.6                |
| 2007      | 1.004.853,08                  | 5,4                | 3.061.836,98                  | 5.4                |
| 2008      | 1.082.806,02                  | 7,8                | 3.299.363,44                  | 7.8                |
| 2009      | 1.156.498,05                  | 6,8                | 3.523.906,69                  | 6.8                |
| 2010      | 1.219.811,04                  | 5,5                | 3.716.824,50                  | 5.5                |
| 2011      | 1.304.050,64                  | 6,9                | 3.983.418,80                  | 7.2                |
| 2012      | 1.401.588,87                  | 7,5                | 4.259.550,60                  | 6.9                |
| 2013      | 1.507.686,50                  | 7,6                | 4.567.987,10                  | 7.2                |
| 2014      | 1.609.594,12                  | 6,8                | 4.876.746,70                  | 6.8                |
| RATA-RATA |                               | 6.08               |                               | 6.01               |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Pada tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa PDRB di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun dari segi pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007-2008 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu dari 5,4% menjadi 7,8 % yang mempunyai selisih lebih besar daripada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. PDRB di tahun ini bergejolak disebabkan oleh sektor-sektor PDRB yang cukup berpartisipasi seperti dalam sektor pertanian. Peningkatan pada sektor pertanian di Kabupaten Soppeng memberikan sumbangsih yang besar.

Kemudian pada tahun 2013 pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada di tahun 2014. Hal ini terjadi karena dampak pada pemilu yang akan dilakukan di tahun 2014 yaitu banyak dana yang masuk dari berbagai sektor PDRB, sedangkan di tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk disebabkan oleh menurunnya pendapatan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

#### **4. Jumlah Penduduk.**

Negara sedang berkembang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Sucipto Wirosardjono:1998).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jurnal, 2005).



Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki perubahan jumlah penduduk yang berfluktuatif dan cenderung meningkat. Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut adalah data jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng.

**Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 10 tahun (2005-2014).**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penduduk<br/>(Jiwa)</b> | <b>Pertumbuhan<br/>(%)</b> |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2005         | 149.901                           | -                          |
| 2006         | 151.027                           | 0,75                       |
| 2007         | 144.196                           | -4,52                      |
| 2008         | 145.887                           | 1,17                       |
| 2009         | 151.374                           | 3,76                       |
| 2010         | 143.049                           | -5,49                      |
| 2011         | 143.328                           | 0,19                       |
| 2012         | 144.596                           | 0,89                       |
| 2013         | 146.980                           | 1,65                       |
| 2014         | 147.642                           | 0,45                       |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)*

Dari tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Begitu pula pertumbuhan penduduk usia produktif mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tabel tersebut dinyatakan bahwa hanya pada tahun 2007 dan 2010 yang mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif. Hal ini terjadi karena di tahun 2007 kebanyakan dari

penduduk tersebut melakukan urbanisasi yaitu berdomisili ke daerah lain seperti ke Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Irian Jaya.

Kemudian di tahun 2010 juga terjadi penurunan jumlah penduduk disebabkan oleh umur yang semakin bertambah sehingga tidak memasuki usia produktif, masih terjadi perpindahan domisili dan juga disebabkan oleh faktor kematian.

### C. Hasil Pengolahan Data

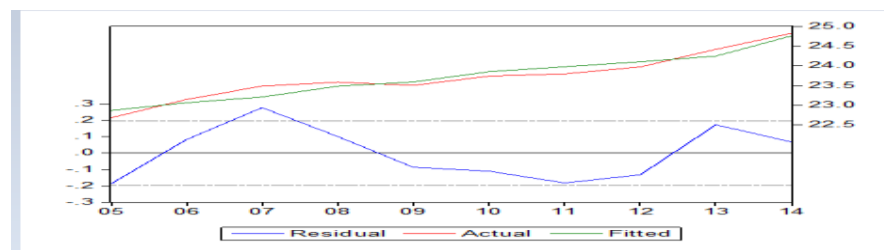
#### 1. Uji Asumsi Klasik

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis korelasi. Adapun pengujiannya, yaitu:

##### a. Uji Heteroskedastisitas

Untuk membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka pada penelitian ini akan digunakan uji *white heteroscedasticity*. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *evIEWS 6*, dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Uji Heteroksedastisitas**



Dengan hasil di atas kita menduga tidak terjadi heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, dengan kata lainnya residualnya

cenderung konstan. Untuk membuktikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dapat kita lihat pada hasil uji *white heteroscedasticity*

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Heteroskedasticity Test: White |          |                     |        |
|--------------------------------|----------|---------------------|--------|
| Obs*R-squared                  | 4,367098 | Prob. Chi-Square(3) | 0,2245 |

Sumber: Eviews 6, 2016 (diolah)

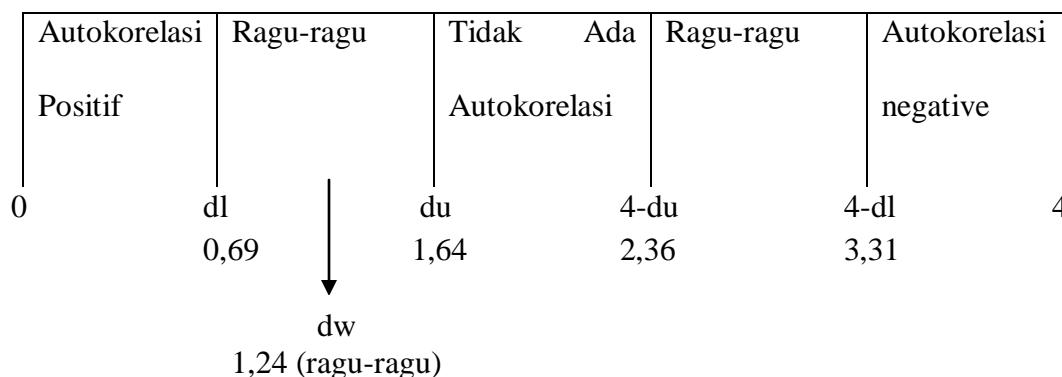
Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai  $\text{probability} = 0,2245 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### b. Uji Autokorelasi

Metode untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian nilai *Durbin Watson (DW Test)*. Jika nilai DW lebih besar batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi juga akan digunakan uji *Serial Correlation LM Test*.

Uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**



Pada pengujian autokorelasi pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,24 yang menggambarkan bahwa  $dl < dw < du$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat keragu-raguan dalam model regresi.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: |          |                     |        |
|---|----------|---------------------|--------|
| Obs*R-squared                               | 4,398434 | Prob. Chi-Square(2) | 0,1109 |

Sumber: Eviews 6, 2016 (diolah)

Kemudian dipertegas pada hasil Uji Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa probability = 0,1109 > 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

### c. Uji Multikolinearitas.

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Pada penelitian ini akan digunakan uji *correlations test*. Apabila koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji multikolinearitas**

|    | X1       | X2       | X3       |
|----|----------|----------|----------|
| X1 | 1        | 0,778276 | -0,13303 |
| X2 | 0,778276 | 1        | -0,34398 |
| X3 | -0,13303 | -0,34398 | 1        |

Sumber: Eviews 6, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat kita lihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda.

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefisient* berdasarkan output *Eviews 6* terhadap variabel-variabel yaitu Daya Pajak ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ), Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Soppeng ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9**  
**Rekapitulasi Hasil Uji regresi**

| Variable              | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.  |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C                     | -87,906     | 48,883             | -1,798      | 0,122  |
| X1                    | -3,985      | 3,019              | -1,319      | 0,235  |
| X2                    | 3,541       | 0,578              | 6,128       | 0,001  |
| X3                    | 0,844       | 3,382              | 0,249       | 0,811  |
| R-squared             | 0,929       | Mean dependent var |             | 23,714 |
| Adjusted R-squared    | 0,894       | S.D. dependent var |             | 0,606  |
| Sum squared resid     | 0,232       | Durbin-Watson stat |             | 1,237  |
| F-statistic           | 26,431      | Prob(F-statistic)  |             | 0,001  |
| Dependent Variabel: Y |             |                    |             |        |

Sumber: *Eviews 6, 2016 (diolah)*

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi ( $\beta$ ) pada tabel 4.9 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln Y = -\alpha - \beta_1 X_1 + \ln \beta_2 X_2 + \ln \beta_3 X_3 + \mu$$

$$Y = -87,906 - 3,985 X_1 + 3,541 X_2 + 0,844 X_3 + \mu$$

Hasil dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien  $\alpha$  sebesar -87,906, angka tersebut menunjukkan bahwa jika Daya Pajak ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ) dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) tidak terjadi perubahan atau konstan, maka memungkinkan terjadinya penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 87,906.
- b. Nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar - 3,985, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan Daya Pajak sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya 3,985 dengan asumsi variabel PDRB ( $X_2$ ) dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar 3,541, menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada PDRB sebesar 1% maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya 3,541 dengan asumsi variabel Daya Pajak ( $X_1$ ) dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) dianggap konstan.
- d. Nilai koefisien  $\beta_3$  sebesar 0,844, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada jumlah penduduk sebesar 1% maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya 0,844 dengan asumsi bahwa variabel Daya Pajak ( $X_1$ ) dan PDRB ( $X_2$ ) dianggap konstan.

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam suatu penelitian. Uji hipotesis terbagi atas tiga macam yaitu:

**a. Uji Koefisien Determinasi (*R Squared*)**

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi untuk dua variabel bebas atau lebih ditentukan dengan nilai *R Squared* sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| R-squared |
|-----------|
| 0,929     |

*Sumber: Eviews 6, 2016 (diolah)*

Berdasarkan tabel 4.10, tampak bahwa hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan  $R^2$  (*R Squared*) sebesar 0,929. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi pendapatan asli daerah yang bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas yaitu daya pajak, PDRB dan jumlah penduduk sebesar 92,9% sedangkan sisanya sebesar 7,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar penelitian, misalnya pengeluaran pemerintah dan inflasi.

**b. Uji F (Kumulatif)**

Uji F merupakan pengujian pengaruh secara kumulatif (bersama-sama) dari variabel Daya Pajak ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ) dan Jumlah Penduduk Usia Produktif ( $X_3$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ). dari hasil analisis diperoleh output pada tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| F-statistic       | 26,432 |
| Prob(F-statistic) | 0,001  |

*Sumber: Eviews 6, 2016 (diolah)*

Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.11 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. maka hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Daya Pajak (X1), PDRB (X2) dan Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng.

**c. Uji t (Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Daya Pajak (X1), PDRB (X2) dan Jumlah Penduduk (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dan menganggap variabel lain konstan. Dari hasil analisis diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

| Variable | Coefficient | Prob. | Keterangan       |
|----------|-------------|-------|------------------|
| C        | -87,906     | 0,122 |                  |
| X1       | -3,985      | 0,235 | Tidak Signifikan |
| X2       | 3,541       | 0,001 | Signifikan       |
| X3       | 0,844       | 0,811 | Tidak Signifikan |

*Sumber: Eviews 6,2016 (diolah)*

Berdasarkan tabel 4.12, pengaruh secara parsial variabel Daya Pajak, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari arah tanda



dan tingkat signifikansi. Hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pengaruh Daya Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel daya pajak ( $X_1$ ) menunjukkan bahwa nilai  $\text{Prob} > \alpha$  ( $0,235 > 0,05$ ), berarti variabel daya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel PDRB ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa nilai  $\text{Prob} < \alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ), berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel jumlah penduduk ( $X_3$ ) menunjukkan bahwa nilai  $\text{prob} > \alpha$  ( $0,811 > 0,05$ ), berarti variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

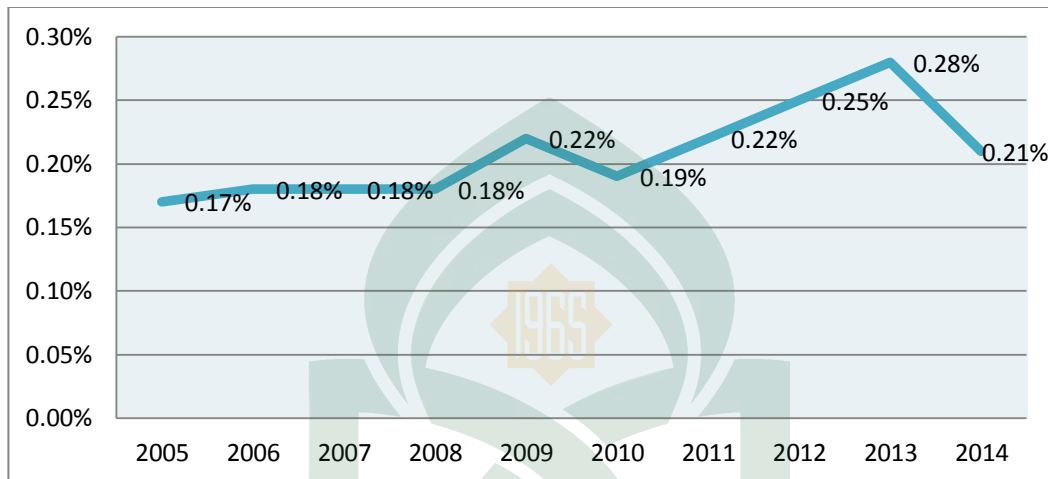
#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

1. Pengaruh Daya Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa daya pajak tidak berpengaruh signifikan ( $0,235 > 0,05$ ) terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusydi yang mengemukakan bahwa daya pajak tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh munculnya indikasi kemalasan pemerintah daerah dalam melakukan eksplorasi sumber-sumber keuangan di daerahnya. Hal ini diperlihatkan

oleh nilai daya pajak yang berfluktuasi dari tahun ke tahun namun cenderung mengalami peningkatan.

**Gambar 4.3**  
**Perkembangan Daya Pajak**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2016 (diolah)

Menurut Rusydi, munculnya kemalasan daerah dalam menggali potensi dan sumber keuangan daerahnya, disebabkan oleh berubahnya fungsi dana perimbangan pusat ke daerah dari fungsi insentif menjadi fungsi pendapatan yang mengakibatkan ketergantungan pada dana perimbangan tersebut. Secara alamiah, memperoleh sesuatu yang gratis (*free*) lebih menarik dibandingkan dengan sesuatu yang harus dicapai dengan kerja keras.<sup>9</sup>

Sagbas dan Saruc mengemukakan bahwa dana transfer pemerintah memberikan dua efek pada daya pajak daerah. Di satu sisi memberikan efek substitusi yaitu dana transfer pemerintah pusat mengurangi daya pajak daerah, dengan kata lain

<sup>9</sup>

Bahrul Ulum Rusydi. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2008)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro .Semarang, (Skripsi, 2010).

terjadi penurunan dalam pengumpulan pajak. Daerah menjadi malas menggali potensi daerah melalui pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh daerah mengandalkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dana transfer dijadikan substitusi pajak. Kemudian di sisi yang lain dana transfer pemerintah juga memberikan efek stimulasi, dimana dana transfer pemerintah ini merangsang peningkatan pajak daerah.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu 2007-2010 pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah mengalami kenaikan rata-rata 3,01% dengan rincian tahun 2007 total dana transfer pemerintah yang diterima adalah Rp 364.303.221.066 dan pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 392.132.343.171 atau mengalami kenaikan 27,64%. Selanjutnya di tahun 2009 dana transfer yang diterima adalah sebesar Rp 401.071.742.260 atau mengalami kenaikan 2,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2010 dana transfer pemerintah pusat yang masuk di Kabupaten Soppeng adalah sebesar Rp 397.522.593.650 atau mengalami penurunan 0,88% dari tahun sebelumnya. Kontribusi dana transfer pemerintah mencapai angka rata-rata 86,34% pertahun selama empat tahun (2007-2010) dan termasuk penerima terbanyak ke tujuh dari seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Soppeng masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.

---

<sup>10</sup>

Handayani Atiah. *Analisis Pengaruh Tranfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Semarang: Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan. Universitas Diponegoro, (Skripsi, 2009).

Pada penelitian ini juga menerangkan daya pajak berhubungan negatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Soppeng, yang artinya bahwa semakin tinggi penarikan pajak kepada masyarakat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah. Daya pajak bisa saja berhubungan negatif terhadap peningkatan pendapatan ketika pemerintah daerah menaikkan pajaknya sedangkan masyarakat tidak mampu membayar pajak yang telah ditetapkan.

Ketika pajak ditingkatkan otomatis akan mengurangi pendapatan disposibel. Apabila pendapatan disposibel rendah otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi pendapatan asli daerah.

## **2. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa PDRB berpengaruh signifikan ( $0,001 < 0,05$ ) terhadap pendapatan asli daerah. Dengan melihat analisis pada tabel 4.9 yang menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Kurniawati Gitaningtyas yang mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya semakin besar PDRB yang diterima maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu kabupaten/kota.

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai koefisien pada variabel PDRB sebesar 3,541 yang artinya bahwa apabila PDRB naik 1% maka PAD akan naik 3,541%. Dengan kata lain apabila PDRB naik sebesar Rp 1 juta rupiah maka PAD akan naik

sebesar Rp 3,541 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap PAD di Kabupaten Soppeng.

Produk Domestik Regional Bruto yang mengalami peningkatan juga akan mempengaruhi pajak daerah dan retribusi daerah yang semakin meningkat, sehingga pendapatan asli daerah yang diterima juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>11</sup>

Variabel PDRB merupakan salah satu indikator makro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah dapat kita lihat di Kabupaten Soppeng yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari berbagai komponen PAD terutama dari segi pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin besar peningkatan PDRB maka semakin besar pula PAD di Kabupaten Soppeng.

### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) Terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif tidak berpengaruh signifikan ( $0,811 > 0,05$ ) terhadap pendapatan asli daerah. Sebagaimana sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahala Bellarminus Lumban Tobing yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja (pekerja) kurang efektif dalam meningkatkan PAD. Semakin banyak jumlah penduduk yang

---

<sup>11</sup> Yeni Kurniawati Gitaningtyas. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi. Universitas Jember, (Skripsi, 2014).

bekerja belum tentu PAD yang dihasilkan meningkat. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya PAD.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus konsekuensinya adalah permintaan akan bahan pangan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung. Artinya akan terjadi ketimpangan yang semakin besar antara jumlah penduduk dan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak terhadap semakin menurunnya tingkat kemakmuran penduduk.<sup>13</sup>

Kabupaten Soppeng yang memiliki jumlah penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya ternyata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena potensi yang dimiliki penduduk usia produktif masih rendah. Sehingga ledakan penduduk tidak mempengaruhi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah malah sebaliknya hanya menambah beban pemerintah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Purwaningsih, jumlah penduduk berpengaruh signifikan namun berhubungan negatif. Apabila jumlah penduduk bertambah maka PAD akan menurun karena penambahan penduduk akan

---

<sup>12</sup> Pahala Bellarminus Lumban Tobing. *Analisis Pengaruh Jumlah Pekerja, Pengeluaran Pemerintah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 1999-2013 (Studi Pada Malang Raya)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, (Jurnal,2015).

<sup>13</sup> Rahardjo Adisasmita. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005),h.24.

menambah beban pemerintah dengan adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>

Esti Purwaningsih. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*, (Tesis: 2011).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa variabel daya pajak (X1), PDRB (X2) dan jumlah penduduk (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan variabel daya pajak dan jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak disebabkan daya pajak daerah masih rendah sedangkan pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah.
2. Meningkatkan PDRB dari berbagai sektor diharapkan dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Soppeng. Peningkatan PDRB dilakukan seperti dengan memberikan sumbangsih berupa bantuan sarana maupun prasarana kepada



sektor-sektor yang termasuk dalam cakupan PDRB untuk meningkatkan hasil produksi dari berbagai sektor.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, misalnya dengan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah dan inflasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Samosir, Omas Bulan, 2010. *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Aini, Hamdan, 2001. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amalia, Lia, 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amarullah, 2008. *Perpajakan Daerah*. Edisi I, Jakarta: Erlangga.
- Anggraeni, Dina, 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi.
- Aryanti, Eni dan Indarti, Iin, 2011. *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2000-2009 di Kota Semarang*. Jurnal.
- Arsyad, Lincolin, 2010. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi II. Yogyakarta: BPF.
- Atiah, Handayani, 2009. *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi.
- Atmaja, Arief Eka, 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang*. Skripsi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2015.
- Baldwin, Robert E, 1986. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Basri, Faisal dan Hasan Munandar, 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Both, Anne dan Peter Mc Cawley, 1990. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama RI, 2002. *Mushaf Al-Qur'an*. Pena Pundi Aksara.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

- Gitaningtyas, Yeni Kurniawati, 2014. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi.
- Gujarati Damodar, 2001. *Ekonomitrika Dasar (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, 1999. *Metodologi untuk Aplikasi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Jamaluddin, 2011. *Pengantar Perpajakan*. Edisi I, Makassar: Alauddin Press.
- Kuncoro, Mudrajat, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UUP AMP YKN.
- Karyawan, Lalu, 2002. *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*. Tesis.
- Markus, Muda, 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Melati, Puput, 2011. *Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Terhadap Investasi Industry Kota Semarang*. Skripsi.
- Prabawa, Agus, 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas*. Jurnal.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- P. Todaro, Michael dan Stephen C. Smith, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. Jakarta: Erlangga.
- Purnastuti, Losina dan Rr. Indah Mustikawati, 2007. *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Grasindo.
- Purwaningsih, Esti, 2011. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*. Tesis.
- Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

- Rohman, Dwi Fitria, 2015. *Pengaruh Daya Pajak (Tax Effort) dan Efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)*. Skripsi.
- Rusydi, Bahrul Ulum, 2010. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2008)*. Skripsi.
- Saebani, Bani Ahmad, 2008. *Metode Penelitian*. Ed.I, Bandung: Pustaka Setia.
- Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji, 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Jurnal.
- Simanjuntak, Payaman J, 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: FSUI.
- Sugiyono, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, Sadono, 2012. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, Hijrah, 2007. *Analisis Determinan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tanjung Balai*. Skripsi.
- Syaukani, Gaffar, Rasyid Affan, Ryas, 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur.
- Tobing, Pahala Bellarminus Lumban, 2015. *Analisis Pengaruh Jumlah Pekerja, Pengeluaran Pemerintah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 1999-2013 (Studi Pada Malang Raya)*. Jurnal.
- Wulandari, Pande Paramitha dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi, 2014. *Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan Asli daerah di Provinsi Bali*. Jurnal.
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi IX, Jakarta: Salemba Empat.

Yani, Ahmad, 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yunato, Lilik, 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Tesis.



L

A

M

P

I

R

A

N



### LAMPIRAN 1

---

TABEL 1 DATA PAD DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005-2014

| Tahun | PAD (Rupiah)      | Ln PAD      |
|-------|-------------------|-------------|
| 2005  | 7.085.151.214,00  | 22,68126705 |
| 2006  | 11.266.106.312,36 | 23,14506461 |
| 2007  | 15.821.801.661,30 | 23,48465468 |
| 2008  | 17.460.780.984,00 | 23,58322312 |
| 2009  | 16.089.970.808,00 | 23,50146198 |
| 2010  | 20.393.023.061,00 | 23,73845867 |
| 2011  | 21.551.766.287,00 | 23,79372361 |
| 2012  | 25.694.588.261,47 | 23,96954623 |
| 2013  | 40.096.283.908,00 | 24,41454950 |
| 2014  | 60.389.274.523,00 | 24,82407735 |

TABEL 2 DATA DAYA PAJAK DI KABUPATEN SOPPENG 2005-2011

| Tahun | Daya Pajak (%) | Jumlah Pajak (Rupiah) |
|-------|----------------|-----------------------|
| 2005  | 0,17           | 1.560.750.000         |
| 2006  | 0,18           | 1.725.707.410         |
| 2007  | 0,18           | 1.810.422.817         |
| 2008  | 0,18           | 1.992.333.187         |
| 2009  | 0,22           | 2.519.256.280         |
| 2010  | 0,19           | 2.352.424.061         |
| 2011  | 0,22           | 2.931.026.549         |
| 2012  | 0,25           | 3.481.525.432         |
| 2013  | 0,28           | 4.282.983.683         |
| 2014  | 0,21           | 10.353.366.859        |

## LAMPIRAN 2

TABEL 3 DATA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS  
DASAR HARGA KONSTAN DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005-2014

| Tahun     | Konstan 2000<br>(Juta) | Pertumbuhan<br>(%) | Konstan 2010<br>(Juta) | Pertumbuhan<br>(%) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 2005      | 894.323,52             | -                  | 2.725.047,95           | -                  |
| 2006      | 953.606,76             | 6,6                | 2.905.686,91           | 6,6                |
| 2007      | 1.004.853,08           | 5,4                | 3.061.836,98           | 5,4                |
| 2008      | 1.082.806,02           | 7,8                | 3.299.363,44           | 7,8                |
| 2009      | 1.156.498,05           | 6,8                | 3.523.906,69           | 6,8                |
| 2010      | 1.219.811,04           | 5,5                | 3.716.824,50           | 5,5                |
| 2011      | 1.304.050,64           | 6,9                | 3.983.418,80           | 7,2                |
| 2012      | 1.401.588,87           | 7,5                | 4.259.550,60           | 6,9                |
| 2013      | 1.507.686,50           | 7,6                | 4.567.987,10           | 7,2                |
| 2014      | 1.609.594,12           | 6,8                | 4.876.746,70           | 6,8                |
| RATA-RATA |                        | 6.08               |                        | 6.01               |

TABEL 4 DATA JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF (15-64 TAHUN) DI  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005-2014

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Ln Jumlah Penduduk |
|-------|------------------------|--------------------|
| 2005  | 149.901                | 11,91773036        |
| 2006  | 151.027                | 11,92521391        |
| 2007  | 144.196                | 11,87892876        |
| 2008  | 145.887                | 11,89058763        |
| 2009  | 151.374                | 11,92750887        |
| 2010  | 143.049                | 11,87094251        |
| 2011  | 143.328                | 11,87289099        |
| 2012  | 144.596                | 11,88169893        |
| 2013  | 146.980                | 11,89805180        |
| 2014  | 147.642                | 11,90254570        |



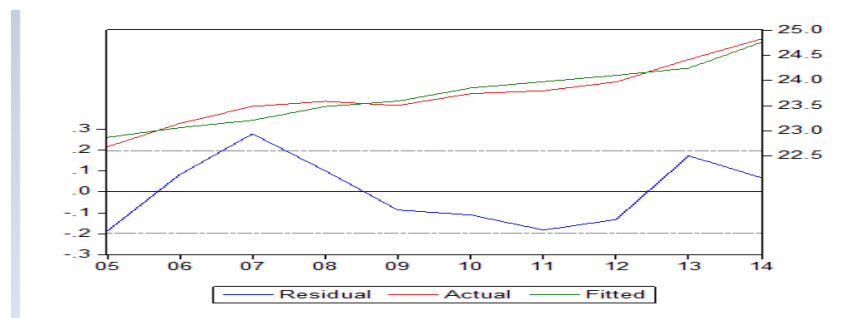
### LAMPIRAN 3

#### HASIL REGRESI

|                            |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Dependent Variable: Y      |             |                       |             |          |
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 02/25/16 Time: 23:12 |             |                       |             |          |
| Sample: 2005 2014          |             |                       |             |          |
| Included observations: 10  |             |                       |             |          |
|                            |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
|                            |             |                       |             |          |
| C                          | -87.9057    | 48.88293              | -1.79829    | 0.1222   |
| X1                         | -3.98476    | 3.018996              | -1.3199     | 0.235    |
| X2                         | 3.540863    | 0.577826              | 6.127905    | 0.0009   |
| X3                         | 0.844495    | 3.381666              | 0.249727    | 0.8111   |
|                            |             |                       |             |          |
| R-squared                  | 0.929656    | Mean dependent var    |             | 23.7136  |
| Adjusted R-squared         | 0.894484    | S.D. dependent var    |             | 0.605566 |
| S.E. of regression         | 0.196707    | Akaike info criterion |             | -0.12502 |
| Sum squared resid          | 0.232163    | Schwarz criterion     |             | -0.00399 |
| Log likelihood             | 4.625118    | Hannan-Quinn criter.  |             | -0.2578  |
| F-statistic                | 26.43172    | Durbin-Watson stat    |             | 1.237496 |
| Prob(F-statistic)          | 0.000741    |                       |             |          |

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

| Heteroskedasticity Test: White |             |                       |             |          |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
|                                |             |                       |             |          |
| F-statistic                    | 1.550568    | Prob. F(3,6)          |             | 0.2959   |
| Obs*R-squared                  | 4.367098    | Prob. Chi-Square(3)   |             | 0.2245   |
| Scaled explained SS            | 0.624906    | Prob. Chi-Square(3)   |             | 0.8907   |
|                                |             |                       |             |          |
|                                |             |                       |             |          |
| Test Equation:                 |             |                       |             |          |
| Dependent Variable: RESID^2    |             |                       |             |          |
| Method: Least Squares          |             |                       |             |          |
| Date: 02/25/16 Time: 23:25     |             |                       |             |          |
| Sample: 2005 2014              |             |                       |             |          |
| Included observations: 10      |             |                       |             |          |
|                                |             |                       |             |          |
| Variable                       | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
|                                |             |                       |             |          |
| C                              | 5.109569    | 2.459571              | 2.077423    | 0.083    |
| X1^2                           | 0.677095    | 0.655646              | 1.032715    | 0.3416   |
| X2^2                           | -0.00168    | 0.000968              | -1.73862    | 0.1328   |
| X3^2                           | -0.02621    | 0.014452              | -1.81334    | 0.1197   |
|                                |             |                       |             |          |
| R-squared                      | 0.43671     | Mean dependent var    |             | 0.023216 |
| Adjusted R-squared             | 0.155065    | S.D. dependent var    |             | 0.02182  |
| S.E. of regression             | 0.020057    | Akaike info criterion |             | -4.69134 |
| Sum squared resid              | 0.002414    | Schwarz criterion     |             | -4.57031 |
| Log likelihood                 | 27.4567     | Hannan-Quinn criter.  |             | -4.82411 |
| F-statistic                    | 1.550568    | Durbin-Watson stat    |             | 2.770792 |
| Prob(F-statistic)              | 0.295866    |                       |             |          |



| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:           |             |                       |             |           |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
|   |             |                       |             |           |
| F-statistic   | 1.57043     | Prob. F(2,4)          |             | 0.3138    |
| Obs*R-squared   | 4.398434    | Prob. Chi-Square(2)   |             | 0.1109    |
|   |             |                       |             |           |
|   |             |                       |             |           |
| Test Equation:  |             |                       |             |           |
| Dependent Variable: RESID                             |             |                       |             |           |
| Method: Least Squares                                 |             |                       |             |           |
| Date: 02/25/16 Time: 23:28                            |             |                       |             |           |
| Sample: 2005 2014                                     |             |                       |             |           |
| Included observations: 10                             |             |                       |             |           |
| Presample missing value lagged residuals set to zero. |             |                       |             |           |
|   |             |                       |             |           |
| Variable  | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.     |
|   |             |                       |             |           |
| C   | -0.2171     | 48.96052              | -0.00443    | 0.9967    |
| X1  | 1.678809    | 3.359941              | 0.499654    | 0.6436    |
| X2  | -0.34845    | 0.595944              | -0.5847     | 0.5901    |
| X3  | 0.834853    | 3.366494              | 0.247989    | 0.8164    |
| RESID(-1)   | 0.57859     | 0.4698                | 1.231568    | 0.2856    |
| RESID(-2)   | -0.70716    | 0.478054              | -1.47924    | 0.2132    |
|   |             |                       |             |           |
| R-squared   | 0.439843    | Mean dependent var    |             | -1.14E-14 |
| Adjusted R-squared                                    | -0.26035    | S.D. dependent var    |             | 0.160611  |
| S.E. of regression                                    | 0.180311    | Akaike info criterion |             | -0.30456  |
| Sum squared resid                                     | 0.130048    | Schwarz criterion     |             | -0.12301  |
| Log likelihood  | 7.522813    | Hannan-Quinn criter.  |             | -0.50372  |
| F-statistic   | 0.628172    | Durbin-Watson stat    |             | 1.935272  |
| Prob(F-statistic)                                     | 0.692017    |                       |             |           |

|    | X1       | X2       | X3      |
|----|----------|----------|---------|
| X1 | 1        | 0.778276 | 0.13303 |
| X2 | 0.778276 | 1        | 0.34398 |
| X3 | -0.13303 | -0.34398 | 1       |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



**Suci Lestari**, lahir di Jampu pada tanggal 11 September 1993.

Anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H. Sukardi dan Ibu Nur Hayati.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di SD Negeri 91 Pacongkang dan tamat di SD Negeri 215 Mattampawalie pada tahun 2005 kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren I'Dadiyah DDI AD Mangkoso selama satu tahun, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren MTS DDI AD Mangkoso di Kabupaten Barru dan tamat di MTS DDI Al Irsyad Pattojo pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MA DDI Al Irsyad Pattojo di Kabupaten Soppeng dan tamat pada tahun 2012.

Melalui Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus (PMJK) pada tahun 2012, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.